Februari, 2022, Volume 4 Nomor 1
E-ISSN 2656-1026

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PAHANDUT KECAMATAN PAHANDUT

Tutik Haryani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
(email: tutikharyaniupp@gmail.com)

Siska Kuswoyo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan 2) Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari :Faktor pendukung dalam pelaksanaaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan, Faktor penghambat dalam pelaksanaaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan

sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang tinggal di desa atau semi kota. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti 2011). Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2010). Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada didesa dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata.

Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik.

Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkanmekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program permberdayaan untuk kepentingan bersama.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat yaitu Kelurahan Pahandut merupakan Ibukota di Kecamatan Pahandut, secara geografis Kelurahan Pahandut memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 8,20 Km^2 dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pedagang dan petani tambak.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ketersediaan akses sumber daya merupakan penunjang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana seperti jalan, yang dapat mengembangkan potensi sumber daya alam, pembangunannya masih kurang maksimal seperti lokasi pemukiman, lokasi tambak ikan. Yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait pembangunannya yang tidak berkelanjutan dan kualitas pembangunannya yang masih kurang. Akses sumber daya yang kurang maksimal disebabkan anggaran yang kurang memadai, sesuai yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat dikelurahan Pahandut Bapak A mengatakan: " Memang sulit dikelurahan karena kurangnya anggaran beda dengan didesa punya ADD, dikelurahan terbatas. bahkan yang saya dengar anggaran fisik yang didanai oleh ADK dihapuskan tahun ini". Senada dengan yang dikatakan salah satu staf kesekretariatan di Kelurahan Pahandut Bapak B mengatakan: " Anggaran Dana Kelurahan memang sedikit dana itu hanya habis di biaya operasional saja".

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut

Pemerintah Kelurahan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan

program di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing begitupula peranannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Kelurahan Pahandut memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Pahandut mencakup pemberdayaan kelompok tani, pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peminjaman modal untuk kelompok tani, dan pembinaan keagamaan. Dari keselurahan program pemberdayaan dikelurahan Pahandut berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Pahandut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Evendy, S.Sos yang mengatakan bahwa :

> ”Berbagai upaya telah dilakukakan dalam rangka memberdayakan masyarakat baik melalui perbaikan akses sumber daya masyarakat seperti pengaspalan jalan, pengerasan jalan, pembangunan bendungan irigasi, perbaikan irigasi, maupun pemberdayaan yang langsung berkaitan dengan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kelompok tani, pembinaan keagamaan, simpan pinjam, dan pemberdayaan melalui pembangunan fisiknya.” *(wawancara tanggal 15 November 2021 pukul 13.00)*

Untuk pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada. Untuk pemberdayaan perempuan baik pembinaan ekonomi melalui kelompok simpan pinjam yang diberikan modal usaha bagi warga yang kurang mampu untuk mengembangkan daya mereka sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari anggota kelompok tersebut, begitupun dengan kelompok tani diberikan pinjaman modal sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari anggota melalui Gapoktan (Gabungan , dan melalui kelompok majelis taklim diberdayakan dengan pengajian rutin dan arisan kelompok. Begitupun pemberdayaan kelompok tani diberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka serta ada pula bantuan bibit, petani ikan keramba.

Selain itu dibidang keagamaan terdapat juga jum’at ibadah yang tidak hanya dilakukan dilingkup pendidikan formal tetapi juga dilingkungan aparat pemerintahan mulai dari kecamatan sampai kelurahan setiap sekali seminggu

dihari jumat, dalam pembinaan keagamaan juga dibentuk pengurus disetiap masjid sehingga kegiatan keagamaan terkoordinir disetiap masjid seperti pengajian rutin dua kali sebulan serta pemberian insentif imam rawatib, dan imam Lingkungan, begitupun pemberdayaan kelompok tani dengan sosialisasi serta pemberian bantuan untuk mengembangkan usaha tani mereka.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pahandut Bapak Evendy S.Sos yang mengatakan bahwa :

> "Untuk pemberdayaan masyarakat kita maksimalkanlembaga masyarakat yang ada, kita bina, kita koordinir, kita kontroldan awasi dan tentunya menjalin hubungan baik antara lembaga masyarakat sebagai mitra dari pemerintah kelurahan dan tentunya masyarakat itu sendiri dalam memberdayakan masyarakat." *(wawancara tanggal 15 Novemver 2021 pukul 13.00),*

Hal ini senada diutarakan oleh Bapak Kurnia seorang Staf Kelurahan Pahandut yang mengatakan bahwa:

> "Saya rasa terkait perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sudah bagus meskipun jujur kami kesulitan di anggaran yang ada, tapi kita berdayakan itu lembaga kemasyarakatan seperti kelompok simpan pinjam, kelompok tani, kelompok majelis taklim dibina dan saling bekerjasama. Dan dari lembaga masyarakat inilah sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan dan pemerintah fasilitasi sehingga dapat memberi bekal keterampilan kepada kelompoknya secara khusus dan masyarakat pada umumnya."(*wawancara tanggal 15 November 2021 Pukul 14.00)*

Peran Pemerintah Kelurahan Pahandut dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang ada serta memberikan motivasi bagi mereka agar setiap program yang dijalankan itu dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Dikelurahan Pahandut, dalam setiap bantuan yang yang masuk selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta masyarakat untuk menerima setiap saran dan masukan mereka tidak hanya di forum musrembang tapi juga digunakan forum non formal seperti momen gotong royong.

Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Pahandut dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.

Upaya pemerintah kelurahan Pahandut dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang perikanan dikarenakan potensi utama wilayah kelurahan ada dibidang perikanan dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pengusahan ikan.

Sosialisasi yang diadakan belum menyeluruh sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat pengusahan ikan dan usaha kecil menengah belum maksmimal. Misalnya penyuluhan jajar pengolahan ikan keramba menjadi olahan makannan cukup membantu pengusaha ikan dalam meningkatkan hasil produksi mereka, akan tetapi penyuluhan yang dilakukan masih berskala kelompok artinya hanya kelompok tani yang mengundang penyuluh saja yang hadir dalam sosialisasi tersebut sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyeluruh. Begitupun pola pikir masyarakat yang lambat menerima hal-hal baru.

Peran pemerintah kelurahan dalam hal bina manusia adalah menciptakan ruang untuk masyarakat berkembang semisal menghadirkan penyuluh baik penyuluh dari dinas perikanan dan UMKM, pengusahaan bibit ikan cara pengolahan ikan, pemasaran, membantu mengkoordinasikan kegiatan tersebut melalui aparat kelurahan tingkat bawah, serta turut serta dalam setiap pertemuan-pertemuan, dan penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok usaha tersebut.

2. Bina Usaha

Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan.

Dikelurahan Pahandut bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil dan bina usaha, dibidang usaha ikan diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pakan, dan umkm.

Upaya pemerintah dalam bina usaha, selain dari pemberian pinjaman modal terdapat pula upaya bina usaha dalam bentuk bantuan bibit, pakan dan modal usahan. Setiap kelompok punya rancangan defenitif kelompok dan setiap tahunnya di kontrol oleh kelompok usaha dari rancangan defenitif kelompok inilah menjadi acuan dari kelompok didalam mendapatkan bantuan dari Dinas Perikan baik itu berupa bibit, pakan.

3. Bina Lingkungan

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk sejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi.

Lingkungan sosial, konteks sosial, konteks sosiokultural, atau *milieu*, adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut (Barnett dan Casper, 2001: 91).

Menurut Ahmadi (2003: 201) lingkungan sosial biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; (1) lingkungan sosial primer; yaitu lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat antara anggota satu dengan anggota lain, anggota satu saling kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain, (2) lingkungan sosial sekunder; yaitu lingkungan sosial yang biasanya hubungan anggota satu dengan anggota lainnya agak longgar dan hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas-aktivitas khusus.

Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial , pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Pahandut bisa dikatakan kelurahan swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membagun suasana dan iklim yang kondusif ke masyarakat dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

4. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan mensyarakatkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk itu telah berfungsi secara efektif.

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat. Menurut Santoso S. (1995:52) mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah: pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi dan memberikan buku petunjuk.

Dikelurahan Pahandut pembinaan terhadap lembaga masyarakat dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Hal ini berdasaarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Pahandut Evendy, S.Sos yang mengatakan bahwa :

> "Kita semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat yang ada dikelurahan misalnyadalam pemanfaatan simpan pinjam kita beri arahan penggunaan dana itu, dijelaskan peruntukannya dan kita juga berikan rekomendasi serta pengawasan dananya. Hal ini juga pada lembaga gapoktan kita sebatas memberikan rekomendasi semisal ada kelompok yang mengusulkan bantuan kemudian

sedikit sosialisasi bahwa ada anggaran seperti ini dan penggunaannya untuk apa. Begitupun dengan lembaga masyarakat yang lain kita sebisa mungkin fasilitasi mereka jika diperlukan dan sering juga sama sama turun langsung dikegiatannya." *(wawancara tanggal 15 November 2021 pukul 13.00)*

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998 : 139). Pelayanan dari pemerintah kelurahan diwujudkan dengan pelayanan yang baik untuk mendapatkan bantuan seperti rekomendasi yang cepat dari pemerintah kelurahan.

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau citacita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110). Menciptakan hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan lembaga masyarakat adalah salah satu cara untuk mengupayakan agar kerjasama dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan penuh tanggungjawab sehingga keduanya berjalan di rana tanggungjawabnya masing-masing.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pembina yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kemudian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pahandut yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan.

Selain faktor pendukung jelas ada faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

(a) Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekolompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang

harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan didaerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

(b) Kesadaran Masyarakat

Secara harfiah kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja (1984:46) menyatakan bahwa "Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu."

Kesadaran masyarakat lahir dari kebiasaaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari proram pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

(c) Tingkat Pendidikan

Menurut Mohammad Ali (2009: 58) dalam buku "Pendidikan untuk Pembangunan Nasional" dijelaskan bahwa "pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional", oleh karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat.

Ada dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi.

Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah:

1) Mengembangkan kompetensi individu,
2) Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan
3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor Penghambat

(a) Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Anggaran merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam memberdayakan masyarakat hal yang paling utama adalah anggaran.

Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana.

(b) Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir itu adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut mindset yang merupakan kepercayaan (belief) atau sekumpulan kepercayaan (set of biliefs) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku (behavior) dan sikap (attitude) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-unsur tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap perilakunya. Jadi pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (attitude). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya.

(c) Aturan Yang Mengikat

Peraturan merupakan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit

diatur. Aturan diciptakan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam suatu wilayah. Setiap daerah punya peraturan yang mengikat untuk tercapainya tujuan dan setiap aturan harus ditaati dan disepakati bersama.

Akan tetapi beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Bab II Pasal (2) Ayat 2 dijelaskan persyaratan umum menjadi perangkat adalah sebagai berikut: Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kesimpulan dan Saran

1. Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:
   a) Bina Manusia
      Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
   b) Bina Usahan
      Pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha berfokus pada pengembangan usaha ikan dan UMKM.
   c) Bina Lingkungan
      Pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial , pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong.
   d) Bina Kelembagaan
      Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
   a) Faktor Pendukung
      Faktor pendukung dalam pelaksanaaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan
   b) Faktor Penghambat
      Faktor penghambat dalam pelaksanaaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

Referensi

Abu Huraerah. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*

Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Affandi, Anwar dan Setia Hadi. (1996). *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.* Jakarta: Prisma.

Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, (2015), *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* Bandung: Alfabeta.

Beratha, I Nyoman. (1982). *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).

Inu Kencana Syafie. (1994). *Etika Pemerintahan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Maskun, Sumitro. (1993). *Pembangunan Masyarakat Desa.* Yogyakarta: Media widya Mandala.

Prasadja, Buddy. (1982). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.* Jakarta: CV.Rajawali.

Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Siagian, Sondang P. (2008). *Adminitrasi Pembangunan.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat.* Bandung : PT. Refika Aditama

Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. (2008). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Syarifin, Jubaedah Dedah. (2006). *Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Tahir Malik, Dangnga M.S, A. Muhibuddin, Sulkifli Syamsir, (2010), *Metolodologi Penelitian dan Aplikasi,* Makasar: Pustaka Pena Press.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, (2013), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,* Bandung: Alfabeta.

Usman, Sunyoto. (1998). *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Wrihatnolo, Randy R.& Riant Nugroho D. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas

Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.